

PERLU KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB PENUH

## Jabatan Publik, Bukan Kursi Empuk di Zona Nyaman

**YOGYA (KR)** - Jabatan publik, bukan kursi empuk di zona nyaman, tetapi justru membawa amanah dan tanggung jawab publik, sesuai bidang ketugasannya masing-masing. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembanakan diri, serta wajib memiliki akuntabilitas publik atas kerjanya.

Untuk itu dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik perlu komitmen, kemauan kuat, dan tanggung jawab penuh agar amanah itu bisa terwujud. "Pembangunan adalah kerja besar yang diamankan rakyat untuk merealisasikan keistimewaan DIY. Konsekuensi dari itu, setiap Kepala OPD dituntut sebagai work-leader, dan menjadi role-model bagi bawahannya. Hendaknya pelantikan ini dijadikan momentum percepatan pembangunan, menuju tujuan untuk meraih makna hakiki Keistimewaan DIY, yaitu peningkatan martabat masyarakat DIY," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pelantikan

dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Bangsal Kepatihan, Selasa (3/1). Dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Achmad Ubaidillah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, kini menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Perlu diketahui

Achmad Ubaidillah adalah suami dari GKR Bendara (menantu Sri Sultan HB X). Sultan mengungkapkan, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk selalu 'tanggap ing sasmita'. Jadi harus benar-benar memahami makna falsafah 'Nagara Mawa Tata, Desa Mawa Cara'. Apalagi, di tengah pusaran tarikan zaman, sosok pemimpin dituntut harus bijak menyikapi dinamika. Hal itu seiring upaya reaktualisasi kearifan lokal, menuju entitas masyarakat budaya-berdaya, culture that make a life worth living. "Selain itu sudah menjadi tugas Kepala Biro Tata Pemerintahan untuk mereformasi kalurahan. Hal itu

penting supaya keberadaan kalurahan lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, dan pembangunan yang inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat," jelas Sultan.

Sementara itu untuk Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang baru, Sultan berharap agar dapat lebih berperan nyata. Serta mampu mengubah mindset 'praseja' selayaknya peran pelapis semata, menjadi sosok 'pangupakara' kolaborasi yang inovatif dan komunikatif, dalam mendukung ketugasan kepala dinas, maupun membangun visi satya wacana. "Selain itu kepada Wakil Kepala Dinas Pertanian saya berharap bisa turut menyelaraskan konsep ketahanan pangan dengan semangat keistimewaan melalui reaktualisasi budaya. Salah satunya adalah 'social engineering' dan perluasan dimensi Lumbung Mata-



Sri Sultan HB X mendengarkan ikrar pada prosesi pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama.

raman," imbuh Sultan. Sementara itu ketika diminta komentar soal pelantikan kedua pejabat yang baru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Amin Purwani mengungkapkan, pelantikan tersebut sudah sesuai prosedur. Karena mereka sudah melewati serangkaian proses hingga dinyatakan

telah memenuhi syarat baik proses pencalonan dan seleksi. Begitu pula, dari sisi pangkat dan golongan, keduanya telah layak untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Karena jabatan di eselon 3 juga sudah dipenuhi, kemudian saat mengikuti proses seleksi terbuka juga sudah lulus.

Selain itu rekomendasi KASN juga sudah keluar dan dinyatakan keduanya memenuhi syarat. "Semua sudah sesuai, sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ada. Pangkat dan golongan keduanya sudah memenuhi, masa jabatan di eselon III juga sudah terpenuhi," terang Amin. (Ria)-f

### BELUM BANYAK WARGA LAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH

## Sat Pol PP Masih Kedepankan Tindakan Persuasif

**YOGYA (KR)** - Kendati gerakan zero sampah anorganik sudah bergulir namun upaya penegakan belum mengarah ke tindakan represif. Sat Pol PP Kota Yogya masih mengedepankan tindakan persuasif terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah tanpa melalui proses pemilahan.



Proses penanganan sampah di depo kawasan Mandala Krida, Selasa (3/1).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP Kota Yogya Suwarna, mengatakan pihaknya sudah mengerahkan petugas Linmas untuk berjaga di 13 depo sampah. "Pengawasan yang kami lakukan untuk memastikan warga hanya membuang sampah organik dan sampah residu saja," jelasnya, Selasa (3/1).

buang ke depo atau TPS masih tercampur antara organik dan anorganik. Sesuai kebijakan yang sudah diterbitkan Pemkot Yogya, TPS atau depo hanya menerima jenis sampah organik atau residu. Sementara sampah anorganik harus sudah terpilah sejak dari sumbernya atau dikelola oleh bank sampah.

Linmas akan bertugas dari pukul 13.00 WIB hingga 05.00 WIB dalam dua shift. Sedangkan dari pukul 05.00 WIB hingga 13.00 WIB penjagaan dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya. Dari pengawasan yang dilakukannya, ternyata memang masih banyak masyarakat yang belum memilah sampah. Sehingga sampah yang ter-

buang ke depo atau TPS masih tercampur antara organik dan anorganik. Sesuai kebijakan yang sudah diterbitkan Pemkot Yogya, TPS atau depo hanya menerima jenis sampah organik atau residu. Sementara sampah anorganik harus sudah terpilah sejak dari sumbernya atau dikelola oleh bank sampah.

belum melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Oleh karena itu para penggerak hendaknya ketika hendak menyetorkan sampah ke depo masih harus melakukan proses pemilahan terlebih dahulu. "Depo sudah tidak mau menerima sampah anorganik, jadi harus kami pilah dulu," ungkap salah satu penggerak, Ngatiman.

Dirinya meyakini masyarakat sebenarnya sudah mengetahui kebijaksanaan penanganan sampah yang mulai berlaku per Januari 2023. Dirinya pun berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga agar sampah bisa dibuang lebih cepat.

Sementara itu berdasarkan hasil pantauan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya, sampah jenis anorganik yang sampai ke depo sebenarnya sudah cukup berkurang. Akan tetapi tetap saja depo sampah masih menemukan sampah yang belum terpilah. Terutama sampah yang dibuang oleh warga dengan menggunakan sepeda motor. (Dhi)-f

belum melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Oleh karena itu para penggerak hendaknya ketika hendak menyetorkan sampah ke depo masih harus melakukan proses pemilahan terlebih dahulu. "Depo sudah tidak mau menerima sampah anorganik, jadi harus kami pilah dulu," ungkap salah satu penggerak, Ngatiman.

Dirinya meyakini masyarakat sebenarnya sudah mengetahui kebijaksanaan penanganan sampah yang mulai berlaku per Januari 2023. Dirinya pun berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga agar sampah bisa dibuang lebih cepat.

Sementara itu berdasarkan hasil pantauan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya, sampah jenis anorganik yang sampai ke depo sebenarnya sudah cukup berkurang. Akan tetapi tetap saja depo sampah masih menemukan sampah yang belum terpilah. Terutama sampah yang dibuang oleh warga dengan menggunakan sepeda motor. (Dhi)-f

## BPKA DIY Terima Penghargaan Jasa Raharja

**YOGYA (KR)** - Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY menerima penghargaan dari PT Jasa Raharja atas upaya kolaborasi dan sinergitas yang telah dilakukan bersama Samsat selama. Penghargaan itu diterima Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso pada acara perayaan HUT ke-62 PT Jasa Raharja di Kantor Pusat PT Jasa Raharja, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/1). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Purwanto.

BPKA DIY memperoleh penghargaan menjadi Terbaik II Tim Pembina Samsat tingkat provinsi.

"Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada provinsi atau daerah setempat yang dinilai mampu berkolaborasi, menjaga sinergitas dan melakukan pembinaan Samsat di tingkat provinsi. Hal itu kami lakukan sebagai tanda terima kasih karena mampu menunjukkan soliditas profesionalisme antar divisi demi tercapainya misi perusahaan. Semoga melalui penghargaan ini bisa turut meng-

inspirasi pihak lain, khususnya instansi Jasa Raharja untuk semakin memperkuat kinerjanya," papar Rivan.

Menurut Rivan, selain kepada BPKA DIY, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda DIY dan PT Jasa Raharja Cabang DIY sebagai mitra kerja BPKA DIY. Dalam kesempatan itu, Rivan juga mengungkapkan ucapan terima kasih atas dukungan dari masyarakat, mitra utama PT Jasa Raharja, Kepolisian RI, Korlantas Polri, Kementerian

Dalam Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI. Serta seluruh rumah sakit di Indonesia dan semua pihak yang selalu mendukung, sehingga performa dan pelayanan Jasa Raharja semakin maksimal. "Semoga apa yang kita lakukan bersama yang menghasilkan prestasi yang membanggakan berupa pelayanan, menjadi lebih cepat dan lebih baik. Semoga cara dan hasil kerja ini akan terus menjadikan kita maju tumbuh berkelanjutan," ungkapnya. (Ria)-f

### HAKIM AGUNG TERJERAT KORUPSI

## Lemahkan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Peradilan

**YOGYA (KR)** - Ditangkapnya Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo, jelang akhir tahun 2022 dalam kasus dugaan suap penanganan perkara mendapat perhatian masyarakat. Ia menjadi tersangka ke-14 yang ditahan KPK terkait kasus suap penanganan perkara di MA.



Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata

"Bayangkan, MA sebagai pengadilan tertinggi untuk menjaga agar hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar, dihuni banyak oknum yang tidak berintegritas," ungkap Rektor Universitas Widyadarmas (UWM), Prof Dr Edy Suandi Hamid MEC kepada KR, Selasa (3/1) menyuarakan keresahan terhadap kondisi lembaga peradilan di Indonesia.

seleksi meliputi kualitas, kesehatan, dan kepribadian. Seleksi terhadap kriteria kepribadian ini dilakukan dengan memperhatikan profile assessment dan track record calon hakim," jelasnya.

Kemudian track record dari calon hakim ini, dikumpulkan dari informasi masyarakat, self assessment calon hakim, dan investigasi oleh KY, yang kemudian dilakukan konfirmasi ulang terhadap data yang diperoleh dengan cara klarifikasi. "Seleksi terhadap calon hakim dilakukan dengan strict dan teliti," tegasnya. Problematika terhadap rendahnya moralitas hakim baru muncul setelah hakim menjalankan tugasnya. "Ketika seorang hakim menjalankan tugasnya akan menemukan berbagai macam gangguan seperti iming-iming suap. Dari temuan KY, dideteksi mafia peradilan yang secara bentuk mirip dengan sel teroris. Mafia ini ditemukan tidak hanya pada tingkatan hakim tetapi juga di berbagai tingkatan elemen lain mulai dari sopir, staf, hingga panitera," ungkapnya. Hal ini dapat dilihat karena untuk menemui hakim secara langsung akan susah karena menimbulkan kecurigaan. (Vin)-f

gai hakim agung pertama yang terjerat kaus korupsi," ungkapnya. Belum selesai kasus Sudrajad, publik kembali dihebohkan dengan penangkapan hakim agung yang kedua yaitu Gazalba Saleh. "Penangkapan pejabat-pejabat ini jelas akan mengundermine kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Rektor menyampaikan hal ini saat Kuliah Umum Fakultas Hukum (FH) UWM dengan narasumber Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata SH M Hum beberapa waktu lalu. "Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, baru pada tahun 2022 ini ada hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Pada bulan September 2022, Sudrajad Dimiyati mendapatkan ikehormatan" seba-

Rektor menyampaikan hal ini saat Kuliah Umum Fakultas Hukum (FH) UWM dengan narasumber Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata SH M Hum beberapa waktu lalu. "Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, baru pada tahun 2022 ini ada hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Pada bulan September 2022, Sudrajad Dimiyati mendapatkan ikehormatan" seba-

## Kemenag Kota Raih Pelayanan Publik Terbaik



Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya menerima piagam penghargaan.

**YOGYA (KR)** - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogya berhasil meraih penghargaan sebagai unit pelayanan publik terbaik. Khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) ramah kelompok rentan. Hasil tersebut setelah melalui penilaian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogya H Nadhif, di Jakarta, Selasa (3/1). Menurut Nadhif, raih tersebut melengkapi predikat yang sebelumnya telah diraih berupa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Pelayanan Publik dengan predikat Prima.

Unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan didasarkan pada penyediaan sarana yang memudahkan layanan bagi para difabel maupun lanjut usia. Nadhif pun mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pejabat dan ASN Kemenag Kota Yogya atas dedikasi dan kerja samanya sehingga prestasi tersebut bisa diraih. "Maknai prestasi ini sebagai pijakan awal untuk mengukir prestasi berikutnya," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan prestasi tersebut maka ke depan tugas akan semakin berat. Terutama dalam merawat dan mempertahankan kualitas layanan agar semakin baik. (Dhi)-f

**PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN**  
Jalan KRT, Pringgondingrat No.1 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401  
Surel : pn.sleman@yahoo.co.id | Laman : http://pn-sleman.go.id

**PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI KEDUA**  
Perkara Nomor : 11/Pdt.Eks/2021/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2022 Nomor : 11/Pdt.Eks/2021/PN.Smn serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 2 Desember 2022 No : S-2820/KNL.0905/2022, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT, Pringgondingrat No 1, Beran, Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (*Close Bidding*) atas obyek jaminan hutang perkara tersebut di atas antara:

**PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO**  
Beralamatkan di Jalan Kawijoyo No. 14 Pengasih - Kulon Progo  
Sebagai Pemohon Eksekusi

**MELAWAN**

- SADAR NARIMA, S.Ag., SH** - Beralamatkan di Tegol Donon RT.002 RW.032 Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI I
- NY. RULI ASTIWI, SE** - Beralamatkan di Pojok RT.001 RW.015 Kalurahan Harjojanang, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI II
- DJUMARI** - Beralamatkan di Karang Tengah RT.001 RW.010 Kalurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI III
- NY. SITI YATINAH** - Beralamatkan di Karang Tengah RT.001 RW.010 Kalurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI IV
- TN. DJAMIN Bin NGATINEM (Dalam KTP tertulis JASMIN MITRO HARJONO)** - Beralamatkan di Dusun Bandongan Wetan RT.002 RW.011 Kalurahan/Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI V
- NY. SUPARNI** - Beralamatkan di Dusun Bandongan Wetan RT.002 RW.011 Kalurahan/Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagai: TERMOHON EKSEKUSI VI.

Yaitu terhadap obyek Terlelang milik Termohon yang berupa :  
Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tanpa kecuai. Tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05659 Desa/Kalurahan Nogotirto, NIB 13.04.01.04.03969 Surat Ukur tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 00035/2013 Luas 547 m2 (lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) diterbitkan tanggal 7 November 2013 atas nama Pemegang Hak DJUMARI dengan batas-batas:  
- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan  
- Sebelah Barat : Tanah Bangunan - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan

• Nilai Limit : Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)  
• Uang Jaminan : Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada:  
Hari : **Rabu**  
Tanggal : **18 Januari 2023**  
Batas Akhir Penawaran : **09.00 waktu server sesuai WIB**  
Alamat Domain : **https://www.lelang.go.id**  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang, melalui internet dengan penawaran secara tertulis (*Close Bidding*) yang diakses pada alamat domain : "http://www.lelang.go.id". Tata cara dan prosedur panduan penggunaan pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet dengan alamat domain pada angka 2 di atas, Kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg" png), dan nomor rekening dengan nama sendiri. Peserta yang bertindak sesuai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariar, Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam suatu file.
- Jaminan penawaran Lelang :  
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).  
b. Setoran jaminan harus sudah aktif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
c. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada calon peserta lelang, serta berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
- Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirakan berkali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHHT sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT, Pringgondingrat No.1 Beran, Sleman, Telp (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Telp. (0274) 544091.

Sleman, 4 Januari 2023  
An. Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
Panitera  
Ating Budiman, SH., MH.  
NIP. 1965 06121986 03 1002